BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam *Pengantar Hubungan Internasional* menyatakan bahwa :

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu hubungan internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, ilmu hubungan internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an 1970-an perkembangan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks dengan masuknya aktor IGO (*International Govermental Organizations*) dan INGO (*International Non-Govermental Organizations*). Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional

adalah tentang interaksi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa.

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem *Bipolar* dan berubah menjadi *Multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *High Politics* (isu politik dan keamanan) meluas kepada isu-isu yang bersifat *Low Politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme dan lainnya).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional (2005 : 7-8).

2.2 Kerjasama Internasional

Fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku

aktor-aktor dalam merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling mengetahui sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Saat ini, sebagian besar interaksi antarnegara dalam sistem internasional bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional maupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan terhadap suatu masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang terbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling

ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

2.3 Interdependensi

Salah satu konsep utama yang dapat dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional saat ini adalah konsep interdependensi. Konsep ini menyatakan bahwa negara bukan merupakan aktor independen secara keseluruhan, justru negara saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tidak ada suatu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lainnya.

Interdependensi itu sebenarnya merupakan turunan dari perspektif liberalisme yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional. Liberalisme

interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif (Perwita & Yani, 2005 : 78).

Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Dalam interdependensi, terdapat setikdaknya beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yaitu sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik. *Sektor Perdagangan*; merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi. Transaksi perdagangan memiliki implikasi besar terhadap interdependensi dibandingkan dengan transaksi internasional yang melibatkan pertukaran informasi antar pemerintah. Antar negara akan terjadi *mutual dependent* dalam hal barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh mereka sendiri.

Sektor investasi; kenaikan pertaruhan atau resiko aktor-aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan untuk semakin tinggi yang disebabkan oleh berubahnya pola investasi. Perubahan ini terutama terjadi pada investasi langsung dalam bentuk kepemilikan saham. Konsekuensinya yaitu diperlukan adanya peningkatan kendali dan keterlibatan investor secara langsung dalam pengelolaan investasinya. *Sektor finansial*; nilai tukar uang yang menjadi

sangat vital dalam hubungan interdependensi. Perubahan-perubahan dalam operasi keuangan telah meningkatkan hubungan interdependensi. Negara yang mata uangnya menjadi media pertukaran berupaya untuk mendisiplinkan kebijakan keuangannya. Sedangkan negara laing mencoba untuk tidak membiarkan mata uangnya merosot di bawah nilai tukar internasional. *Sektor politik*; terdapat suatu kesadaran bahwa suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara ini akan dapat saling melengkapi kekurangan dari masingmasing negara.

Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam bekerjasama berpijak pada dua hal, yakni *power*, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar-menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan antar mereka.

2.4 Regionalisme

2.4.1 Definisi dan klasifikasi Regional atau Kawasan

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, medefinisikan :

> "Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan." (Perwita & Yani, 2005 : 104).

Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian, yaitu *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan). Mereka juga menyatakan, setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara dalam kawasan, yaitu sifat dan kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.

2.4.2 Karatkteristik Regionalisme

Dekade 1960-an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara dunia ketiga. Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalisme baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan-

pengaturan kawasan. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses pertumbuhan regionalisme, yaitu :

> "Tahap pertama disebut sebagai '*pre-regional stage*' dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi sosial bersama dalam suatu unit geografis tertentu. Tahap kedua adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir adala output dari proses regionalisasi dimana pembentukan indentitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional." (2005 : 107).

R. Stubbs dan G. Underhill yang dikutip oleh Perwita dan Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme. Elemen yang pertama yaitu, kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula derajat interaksinya. Dikarenakan kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama (*regional awarness and identity*).

Kedua, adanya keterkaitan yang sngat erat di antara mereka terhadap suatu 'batas' kawasan atau dimensi 'ruang' dalam interaksi mereka (*spatial dimension of regionalism*). Ketiga, terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi diantara mereka dan menyediakan 'aturan main' dalam kawasan. Elemen ini pula yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan (2005 : 107-108).

2.4.3 Bentuk-bentuk Regionalisme

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi reional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai 'integrasi dangkal' (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa 'integrasi dalam' (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Bentuk berikutnya adalah '*Inter-regionalism*' dan '*Regional transnationalism*'. Bentuk ini mengacu kepada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. Inter-regionalism juga merujuk kepada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *trans-regional* (antar kawasan). APEC yang terbentuk 1989 yang merupakan hasil dari bentuk *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Selatan. Kemudian adanya ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang merupakan bentuk

dari *bi-regional* Asia dan Eropa. Lalu adanya kerjasama antara Eropa dengan Amerika Latin yang tergabung dalam *European-Latin America Summit* yang dibentuk pada 1999, serta *The Africa-EU Summit* antara negara-negara di Afrika dengan Eropa. Dan yang terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang dibentuk pada 2001 antara negara-negara di Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan Amerika Latin.

Bentuk ketiga adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan semacam ini kerapkali memakai peranan dominan dalam kerjasamanya. Misalnya, mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan trans-atlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa.

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (2005 : 110).

2.5 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber - sumber hukum internasional terdiri dari :

1. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Kebiasaan Internasional.
3. Prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh negara - negara beradab.
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional (Mauna, 2001 : 84).

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan - ikatan yang mempunyai akibat - akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu :

1. Adanya Subjek Hukum Internasional, negara adalah subjek hukum internasional, yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian -perjanjian internasional.
2. Rezim Hukum Internasional, suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2001 : 88).

2.5.1 Mulai berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu

perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut, yaitu :

1. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional Segera Sesudah Tanggal Penandatanganan, bagi perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.
2. Notifikasi Telah Dipenuhinya Persyaratan Konstitusional, suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing – masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya dan demikian pula sebaliknya.
3. Pertukaran Piagam Pengesahan, suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing-masing negara pihak setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing.
4. Penyimpanan Piagam Pengesahan, bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak – pihak pada

perjanjian tersebut maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan sebagaimana halnya dalam perjanjian bilateral.

5. Aksesi, bagi perjanjian – perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjiandapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari (Mauna, 2001:124-132).

2.5.2 Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah :

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama.
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihgak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Musnahnya obyek dari perjanjiuan itu sendiri.

7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Parthiana, 2003 : 235-238).

2.6 Ekonomi-Politik Internasional

Ekonomi-politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an. Dimana pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, hal ini menjadi awal timbulnya kesadaran kepada para pemegang otoritas pemerintahan akan pentingnya faktor ekonomi yang menentukan proses politik, begitupun juga sebaliknya. Sehingga eksistensi antara negara dan pasar keduanya tidak dapat dipisahkan.

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional. Ekonomi-politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Menurut Robert Gilpin yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan, bahwa ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (Perwita & Yani, 2005 : 76).

Lebih lanjut lagi, bahwa “politik ekonomi” sebagai suatu subdisiplin yang membahas tentang interaksi antara berbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan

menggunakan berbagai paradigma, perspektif, teori dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi (Hadiwinata, 2002 : 27).

Joan E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi-politik internasional, ia menyatakan bahwa :

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how ?*". Ekonomi internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional." (2005 : 76).

Lebih lanjut, ia juga mengemukakan bahwa ada empat cara bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi ekonomi, yaitu :

1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
2. Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik.
4. Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non-negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. (2005 : 76-77).

Ada keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, dalam hal ini mengutip dari pandangan Miriam Budiardjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ia menyatakan bahwa tujuan ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkal-tolak pada faktor kelangkaan (*scarcity*) menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasionil, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*, yang mana pengaruhnya meluas pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*). Oleh karena pilihan-pilihan tentang kebijakan yang harus ditempuh seringkali terbatas adanya, maka ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat *choice-oriented*, hal mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai *decision-making* dalam ilmu politik modern (Budiardjo, 2005 : 23).

Ekonomi-politik internasional merupakan ilmu sosial yang didasarkan pada satu kerangka masalah, isu dan kejadian dimana unsur ekonomi, politik dan internasional terkait dan tumpang tindih sehingga menciptakan pola interaksi yang kaya. Secara empirik, tingkat ketergantungan (Interdependensi) dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme dalam ekonomi yang melewati batas-batas negara, seperti peningkatan perdagangan, keangotaan kelompok-kelompok ekonomi regional dan proses globalisasi, telah menjadikan kondisi dimana tidak ada lagi suatu kebijakan ekonomi politik nasional yang benar-benar bersifat domestik.

2.7 Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas merupakan pertukaran barang dan jasa antarnegara dengan tanpa adanya aturan, aturan dalam hal ini adalah pajak, kuota ekspor dan impor, peraturan negara tentang proteksi serta peraturan-peraturan lainnya yang sekiranya menghambat perdagangan antarnegara. Sederhananya perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara tanpa adanya kerumitan birokrasi.

Menurut Gilpin yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam *Politik Bisnis Internasional*, menyatakan bahwa :

> "Perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena adanya saling keterantungan ekonomi yang dapat menciptakan hubungan-hubungan positif antarbangsa yang pada gilirannya akan mengembangkan harmoni kepentingan". (Hadiwinata, 2002 : 28).

Setiap negara tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, semisal ada negara yang tidak dapat memproduksi peralatan canggih, namun memiliki sumber daya alam yang memungkinkan untuk dijual. Di sisi lain ada negara yang memiliki kapasitas untuk memproduksi peralatan canggih namun kurang dalam hal sumber daya alamnya. Sebelum perdagangan bebas mungkin negara-negara tersebut memiliki hambatan untuk saling berinteraksi, namun dengan adanya perdagangan bebas, negara-negara tersebut akhirnya dapat berinteraksi.

2.8 Ekspor dan Impor

Kegiatan ini mempunyai banyak sekali tujuan, namun tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak heran kegiatan ini menjadi begitu penting serta hampir seluruh negara melakukan kegiatan ini. Ekspor sendiri

dapat diartikan sebagai suatu proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke nagara lain yang dilakukan secara legal, yakni dengan melakukan pengeluaran yang berasal dari dalam negeri untuk dikirim ke negara lain.

Menurut Marolop Tandjung dalam *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sedangkan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011 : 269 & 379).

Secara umum, impor sendiri memiliki pengertian yang terbalik dari ekspor, yakni proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain yang dilakukan secara legal, yaitu dengan cara memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Proses ekspor dan impor yang dilakukan dengan skala yang besar harus melalui bea dan cukai. Bea dan cukai dalam hal ini berfungsi sebagai badan yang mengawasi barang-barang yang akan masuk maupun keluar dari dalam negeri. Kegiatan pada umumnya dilakukan untuk mengendalikan nilai barang yang ada di dalam negeri. Jika jumlah suatu barang di dalam negeri terlalu melimpah, maka akan mengakibatkan nilai barang tersebut jatuh, dengan melakukan ekspor terhadap barang tersebut ke negara lain perlu dilakukan guna mengendalikan harga.

Kegiatan impor sendiri justru bersifat terbalik, yakni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang yang dirasakan jumlahnya kurang untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Selain itu juga, hal ini bertujuan untuk menjaga

agar kelangkaan barang dikarenakan kurangnya kebutuhan yang ada tidak menyebabkan harga melonjak.

2.9 Devisa

Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia seperti US Dollar, Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, dan lainnya. Pada dasarnya devisa dapat berfungsi sebagai :

1. Alat pembayaran luar negeri (perdagangan, ekspor, impor, dan seterusnya)
2. Alat pembayaran utang luar negeri.
3. Alat pembiayaan hubungan luar negeri, misalnya perjalanan dinas, biaya korps diplomatik kedutaan dan konsultan, serta hibah (hadiah, bantuan) luar negeri.
4. Sebagai sumber pendapatan negara (http://id.wikipedia.org/wiki/Devisa - Diakses 09 November 2011).

Devisa sering juga disebut sebagai alat pembayaran luar negeri, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *Foreign Exchange*. Uang, valuta asing atau *Foreign Currency* mempunyai arti sebagai alat pembayaran, alat penukaran, alat pengukur nilai dan alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Devisa dalam peredarannya memiliki berbagai macam atau bentuk, yaitu wesel luar negeri, saham perusahaan luar negeri, surat-surat obligasi, *Cheque* atau giro, rekening di luar negeri dan uang kertas luar negeri dan surat-surat berharga lainnya (Amalia, 2007 : 34).

2.10 Sektor Pertanian

Menurut Gunawan Satari dalam *Dasar-dasar Agronomi*, pertanian dapat diartikan pula sebagai berikut :

> "Pertanian adalah suatu usaha kegiatan manusia dalam rangka meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam hayati melalui proses produksi atau usaha ekstraksi selektif untuk memenuhi perkembangan kebutuhan manusia dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelestarian produktivitas alam". (Satari, 2004 : 2).

Secara umum pertanian dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian - Diakses 20 November 2011).